

## Analisis Pengaruh Dana Transfer Daerah terhadap Ketimpangan Pendapatan melalui Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara

Achsani Taqwim Dwi Affan<sup>1</sup>, Juliansyah Roy<sup>2</sup>, Diana Lestari<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman Samarinda

*ewiem08@gmail.com*<sup>1</sup>

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the effect of regional transfer funds on income inequality through economic growth as a mediating variable in Kutai Kartanegara Regency. Using a quantitative explanatory approach, the research employed time-series secondary data for the 2010–2024 period sourced from Statistics Indonesia (BPS) and the Ministry of Finance. The data were analyzed using path analysis with three regression models and the Sobel test to examine the mediation effect. The results show that regional transfer funds (Revenue Sharing Fund/DBH, General Allocation Fund/DAU, Special Allocation Fund/DAK, and Provincial Financial Assistance) do not simultaneously have a significant effect on economic growth, while economic growth itself has no significant effect on income inequality. In the direct-effect model, DAU significantly widens inequality, whereas DAK significantly reduces it. The Sobel test confirms that economic growth fails to mediate the effect of regional transfer funds on income inequality (all p-values > 0.05). These findings indicate that the relationship between transfer funds and inequality is predominantly direct rather than transmitted through macroeconomic growth, reflecting a structural bottleneck in a resource-dependent region. Inequality reduction must therefore rely on directly targeted, pro-equity fiscal spending rather than aggregate economic growth.*

**Keywords :** *regional transfer funds, income inequality, economic growth, kutai kartanegara.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh dana transfer daerah terhadap ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan pendekatan kuantitatif eksplanatif, penelitian menggunakan data sekunder runtun waktu periode 2010–2024 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan. Data dianalisis menggunakan analisis jalur (path analysis) dengan tiga model regresi serta uji Sobel untuk menguji efek mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana transfer daerah (Dana Bagi Hasil/DBH, Dana Alokasi Umum/DAU, Dana Alokasi Khusus/DAK, dan Bantuan Keuangan Provinsi) secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Pada model pengaruh langsung, DAU memperlebar ketimpangan secara signifikan, sedangkan DAK terbukti signifikan menurunkannya. Uji Sobel mengonfirmasi bahwa pertumbuhan ekonomi gagal memediasi pengaruh dana transfer daerah terhadap ketimpangan pendapatan (seluruh p-value > 0,05). Temuan ini mengindikasikan bahwa hubungan antara dana transfer dan ketimpangan lebih dominan bersifat langsung dan tidak ditransmisikan melalui pertumbuhan makro, mencerminkan kebuntuan struktural pada daerah berbasis sumber daya alam. Upaya penurunan ketimpangan karenanya harus mengandalkan belanja fiskal yang tertarget langsung dan pro-pemerataan, bukan pertumbuhan ekonomi agregat.

**Kata kunci :** dana transfer daerah, ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, kutai kartanegara

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan ekonomi daerah merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata di Indonesia. Sejak bergulirnya era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada awal tahun 2000-an, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sumber daya dan menetapkan prioritas pembangunan di wilayahnya (Fahrizal & Bintoro, 2022). Instrumen utama dalam desentralisasi fiskal adalah dana transfer daerah, yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Bantuan Keuangan Provinsi. Dana-dana ini diharapkan menjadi stimulan bagi pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus alat untuk pemerataan pendapatan.

Namun, implementasi desentralisasi fiskal tidak selalu berjalan sesuai harapan. Berbagai studi menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan alokasi dana transfer ke daerah, permasalahan ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi yang belum merata masih menjadi tantangan serius (Nasyri, Hailuddin, & Fadliyanti, 2025). Ketimpangan pendapatan yang diukur dengan rasio Gini seringkali menunjukkan angka yang fluktuatif bahkan meningkat di beberapa wilayah, meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi (Cahyaningrum & Prasetyo, 2025). Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas dana transfer daerah dalam mencapai tujuan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan.

Secara teoritis, dana transfer daerah memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi alokasi dan fungsi pemerataan (Marsella & Gamayuni, 2025). Ketika dana transfer diinvestasikan secara produktif, ia diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi diharapkan menjadi jembatan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Akan tetapi, fenomena di lapangan kerap lebih kompleks. Manek dan Badrudin (2017) menemukan bahwa dana perimbangan di Nusa Tenggara Timur tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, sementara Awaludin dan Wibowo (2023) menemukan bahwa berbagai jenis dana transfer memiliki dampak yang berbeda terhadap variabel ekonomi dan sosial.

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah yang menarik untuk dikaji. Sebagai daerah penghasil sumber daya alam yang kaya, Kutai Kartanegara menerima alokasi dana transfer yang signifikan, terutama dari mekanisme DBH sumber daya alam. Namun, kekayaan sumber daya alam dan tingginya dana transfer bukan jaminan otomatis bagi pemerataan kesejahteraan. Daerah kaya sumber daya justru sering menghadapi tantangan ketimpangan yang lebih serius akibat ketergantungan pada sektor ekstraktif padat modal, potensi Dutch disease, risiko tata kelola yang buruk, serta kurangnya diversifikasi ekonomi

(Indrarto dkk., 2013; Fahrizal & Bintoro, 2022). Struktur perekonomian Kutai Kartanegara yang didominasi sektor pertambangan dan penggalian hingga di atas 67% dari PDRB memperkuat relevansi kajian ini.

Pertumbuhan ekonomi sebagai indikator makroekonomi sering dianggap sebagai motor penggerak pemerataan pendapatan. Namun hubungan keduanya tidak selalu linear. Penelitian Zaini (2018) di Kalimantan Timur menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dan kontribusi subsektor batubara justru berhubungan positif dengan ketimpangan. Putri (2024) juga menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berdampak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa struktur pertumbuhan dan cara manfaatnya didistribusikan menjadi sangat menentukan.

Meskipun banyak penelitian mengkaji desentralisasi fiskal dan dampaknya, sebagian besar berfokus pada pengaruh langsung dana transfer terhadap pertumbuhan ekonomi atau terhadap ketimpangan. Penelitian yang secara eksplisit menganalisis jalur pengaruh dana transfer daerah terhadap ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi, terutama pada konteks daerah penghasil sumber daya alam seperti Kutai Kartanegara, masih terbatas. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh langsung dana transfer daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, pengaruh langsung pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan, pengaruh langsung dana transfer daerah terhadap ketimpangan pendapatan, serta pengaruh tidak langsung dana transfer daerah terhadap ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatif (kausalitas) yang berlandaskan paradigma positivisme. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menguji hipotesis dan mengukur hubungan kausal antarvariabel menggunakan data numerik dan analisis statistik (Sugiyono, 2019). Lokasi penelitian adalah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan periode analisis runtun waktu (time series) tahun 2010–2024.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Kartanegara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan), serta Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap publikasi dan laporan resmi pemerintah. Penelitian melibatkan empat variabel independen, yaitu DBH ( $X_1$ ), DAU ( $X_2$ ), DAK ( $X_3$ ), dan Bantuan Keuangan Provinsi ( $X_4$ ); satu variabel mediasi, yaitu pertumbuhan ekonomi ( $Y_1$ ) yang diukur dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan; serta satu variabel dependen, yaitu ketimpangan pendapatan ( $Y_2$ ) yang diukur dengan rasio Gini.

Teknik analisis data menggunakan analisis jalur (*path analysis*) yang merupakan pengembangan dari analisis regresi berganda untuk menguji hubungan langsung dan tidak langsung antarvariabel (Hair et al., 2014). Model jalur terdiri atas persamaan pengaruh dana transfer daerah terhadap pertumbuhan ekonomi (Model 1), persamaan pengaruh dana transfer daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan (Model 2), serta persamaan pengaruh langsung dana transfer daerah terhadap ketimpangan pendapatan (Model 3). Sebelum estimasi, dilakukan uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas), kemudian uji hipotesis melalui uji F, uji t, dan koefisien determinasi. Signifikansi pengaruh mediasi diuji menggunakan pendekatan Baron dan Kenny serta uji Sobel (Preacher & Hayes, 2004). Seluruh pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS 27.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Data dan Variabel Penelitian

Penelitian ini menganalisis data sekunder periode 2010–2024 yang mencakup empat komponen dana transfer daerah, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan. Definisi operasional masing-masing variabel disesuaikan dengan standar BPS dan Kementerian Keuangan untuk memastikan konsistensi dan validitas data, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Ringkasan Deskripsi Variabel Penelitian**

Variabel	Definisi Operasional	Satuan	Sumber Data
Dana Bagi Hasil (DBH)	Realisasi DBH Kabupaten Kutai Kartanegara	Miliar Rupiah	LKPD Kutai Kartanegara
Dana Alokasi Umum (DAU)	Realisasi DAU Kabupaten Kutai Kartanegara	Miliar Rupiah	LKPD Kutai Kartanegara
Dana Alokasi Khusus (DAK)	Realisasi DAK Kabupaten Kutai Kartanegara	Miliar Rupiah	LKPD Kutai Kartanegara
Bantuan Keuangan (Bankeu)	Realisasi Bankeu Provinsi	Miliar Rupiah	LKPD Kutai Kartanegara
Pertumbuhan Ekonomi (PE)	Laju pertumbuhan PDRB harga konstan	Persen (%)	BPS Kutai Kartanegara
Ketimpangan Pendapatan (KP)	Angka Gini Ratio	Rasio (0–1)	BPS Kutai Kartanegara

Sumber: diolah penulis, 2026

### Pengaruh Dana Transfer Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Model 1)

Hasil regresi Model 1 menunjukkan nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,642 dan koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,412, yang berarti 41,2% variasi pertumbuhan ekonomi dijelaskan oleh keempat komponen dana transfer,

sedangkan sisanya 58,8% dijelaskan faktor lain di luar model. Setelah disesuaikan, nilai Adjusted R Square turun menjadi 0,119 (11,9%). Penurunan ini wajar terjadi karena keterbatasan jumlah sampel dibandingkan banyaknya variabel independen.

Uji F menghasilkan nilai F hitung sebesar 1,404 dengan signifikansi 0,316 (> 0,05), sehingga secara simultan DBH, DAU, DAK, dan Bantuan Keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara parsial, DBH memiliki koefisien beta paling dominan (0,588) dengan signifikansi 0,077, yang berarti berpengaruh positif namun tidak signifikan. Sementara DAU, DAK, dan Bantuan Keuangan masing-masing memiliki signifikansi 0,749; 0,541; dan 0,241 (> 0,05), sehingga tidak berpengaruh signifikan. Nilai VIF seluruh variabel di bawah 10 menunjukkan model bebas dari multikolinearitas.

Temuan ini secara empiris mendukung Manek dan Badrudin (2017) serta Damingtyas dan Yuliarmi (2024) yang menyatakan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi ini menjadi bukti bekerjanya paradoks kekayaan alam (*natural resource curse*), di mana daerah dengan struktur ekonomi yang dikuasai sektor ekstraktif padat modal cenderung mengalami stagnasi kualitas pertumbuhan meskipun menerima aliran dana transfer yang melimpah (Zaini, 2018). Sebagian besar DBH yang bersifat fluktuatif mengikuti harga komoditas global lebih banyak terserap untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah dibandingkan mentransformasikan kapasitas produksi daerah.

### **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan**

Hasil estimasi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki arah koefisien positif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (Indeks Gini), dengan signifikansi sebesar 0,672 (> 0,05). Hal ini berarti fluktuasi laju pertumbuhan PDRB makro di Kutai Kartanegara terisolasi dari perbaikan distribusi pendapatan masyarakat.

Temuan ini menolak keberlakuan Kurva Kuznets konvensional dan memperkuat penelitian Zaini (2018), Putri (2024), serta Damingtyas dan Yuliarmi (2024) yang membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi makro tidak berdampak signifikan terhadap pengurangan ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi Kutai Kartanegara selama 2010–2024 tergolong pertumbuhan eksklusif (*non-inclusive growth*) karena ditopang oleh sektor pertambangan padat modal yang dikuasai korporasi besar, sehingga hanya menyerap sedikit tenaga kerja lokal dan gagal menciptakan trickle-down effect bagi sektor padat karya seperti pertanian.

### **Pengaruh Langsung Dana Transfer Daerah terhadap Ketimpangan Pendapatan (Model 3)**

Berbeda dengan Model 1, pengujian simultan pada Model 3 menunjukkan bahwa komponen dana transfer daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Indeks Gini, dengan nilai F hitung sebesar 5,447 dan signifikansi

0,020 ( $< 0,05$ ) serta daya jelaskan (R Square) sebesar 73,1%. Hal ini menegaskan bahwa pengaruh dana transfer terhadap ketimpangan lebih banyak terjadi secara langsung dibandingkan melalui jalur pertumbuhan ekonomi.

Secara parsial, DAU berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap Indeks Gini (Sig. 0,002; koefisien 0,020). Setiap peningkatan DAU justru berpotensi memperlebar ketimpangan. Fenomena ini terjadi karena DAU bersifat block grant yang porsi terbesarnya terserap untuk belanja pegawai dan operasional birokrasi yang terkonsentrasi di ibu kota kabupaten (Tenggarong), sehingga perputaran uangnya menumpuk di wilayah perkotaan dan kelas menengah-atas. Sebaliknya, DAK berpengaruh negatif dan signifikan (Sig. 0,036; koefisien  $-0,019$ ), yang berarti peningkatan DAK efektif menurunkan ketimpangan. Hal ini sejalan dengan sifat DAK yang earmarked untuk pemenuhan pelayanan dasar dan infrastruktur publik di pedesaan. Adapun DBH (Sig. 0,856) dan Bantuan Keuangan (Sig. 0,573) tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan.

Efek merugikan DAU terhadap ketimpangan ini didukung argumen Pambudi (2023) bahwa desentralisasi fiskal berisiko memperlebar kesenjangan jika alokasinya didominasi pengeluaran non-produktif, serta selaras dengan temuan Nasyri dkk. (2025). Sebaliknya, pengaruh protektif DAK memperkuat temuan Marsella dan Gamayuni (2025) serta Nurmansyah dan Tandean (2023) bahwa dana transfer khusus yang diarahkan pada infrastruktur dasar efektif mereduksi disparitas wilayah. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov (Sig. 0,200) dan Shapiro-Wilk (Sig. 0,403) mengonfirmasi residual model terdistribusi normal.

## Peran Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Mediasi (Uji Sobel)

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung, dilakukan uji Sobel terhadap keempat jalur mediasi. Hasil pengujian hipotesis secara ringkas disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Pengujian Hipotesis

Kode	Hubungan Variabel	Koefisien/Beta	Sig.	Keterangan
<b>A. Pengaruh Langsung</b>				
H1	DBH → Pertumbuhan Ekonomi	0,588	0,077	Ditolak
H2	DAU → Pertumbuhan Ekonomi	0,126	0,749	Ditolak
H3	DAK → Pertumbuhan Ekonomi	0,300	0,541	Ditolak
H4	Bankeu → Pertumbuhan Ekonomi	0,513	0,241	Ditolak
H5	DBH → Ketimpangan	$-0,102$	0,856	Ditolak
H6	DAU → Ketimpangan	1,137	0,002	Diterima

Kode	Hubungan Variabel	Koefisien/Beta	Sig.	Keterangan
H7	DAK → Ketimpangan	-0,764	0,036	Diterima
H8	Bankeu → Ketimpangan	-0,104	0,573	Ditolak
H9	Pertumbuhan Ekonomi → Ketimpangan	0,111	0,672	Ditolak
<b>B. Pengaruh Tidak Langsung (Mediasi - Uji Sobel)</b>				
H10	DBH → PE → Ketimpangan	0,485	0,627	Ditolak
H11	DAU → PE → Ketimpangan	0,276	0,783	Ditolak
H12	DAK → PE → Ketimpangan	-0,394	0,694	Ditolak
H13	Bankeu → PE → Ketimpangan	-0,465	0,642	Ditolak

Sumber: diolah penulis, 2026

Berdasarkan uji Sobel, seluruh jalur pengaruh tidak langsung menghasilkan p-value yang jauh melampaui ambang 0,05, yaitu DBH (0,627), DAU (0,783), DAK (0,694), dan Bankeu (0,642). Dengan demikian, Hipotesis 10 hingga 13 ditolak. Pertumbuhan ekonomi terbukti gagal berfungsi sebagai variabel mediasi dalam menjembatani pengaruh dana transfer daerah terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Gagalnya peran mediasi ini mendukung temuan Damarinyas dan Yuliarmi (2024) yang juga menemukan ketiadaan efek tidak langsung dana transfer terhadap ketimpangan melalui pertumbuhan ekonomi. Temuan ini mengonfirmasi adanya kebuntuan struktural (structural bottleneck) pada ekonomi daerah kaya sumber daya alam. Aliran dana transfer fiskal dari pemerintah pusat ke daerah langsung mengintervensi struktur ketimpangan pengeluaran masyarakat tanpa melalui transmisi output pertumbuhan ekonomi makro. Implikasinya, kebijakan fiskal daerah tidak dapat mengandalkan pertumbuhan ekonomi makro sebagai instrumen otomatis pengentasan kesenjangan, melainkan harus mengandalkan intervensi alokasi belanja yang bersifat langsung, terukur, dan fokus pada penguatan modal manusia serta infrastruktur dasar perdesaan.

### Implikasi Kebijakan

Hasil penelitian menghasilkan beberapa implikasi kebijakan strategis bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pertama, mempertimbangkan restrukturisasi alokasi belanja yang bersumber dari DAU yang bersifat konsumtif-birokratis dan mengalihkannya untuk menambah porsi belanja modal publik serta program jaminan sosial daerah yang menyentuh pekerja rentan di wilayah

pedalaman, guna memecah konsentrasi perputaran uang DAU yang menumpuk di pusat pemerintahan.

Kedua, mengoptimalkan penyerapan dan penargetan DAK dengan menyusun usulan DAK Fisik berbasis data spasial mikro (Indeks Desa Membangun) dan mempercepat proses lelang pada triwulan pertama tahun anggaran, agar pemanfaatannya tidak menumpuk di akhir tahun. Ketiga, mendorong diversifikasi ekonomi melalui pemanfaatan DBH sumber daya alam yang diarahkan (*earmarking*) ke sektor non-ekstraktif padat karya seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan. Keempat, memperkuat sistem monitoring berbasis dampak distribusi pendapatan untuk memastikan tidak terjadi bias elit (*elite capture*) dalam pemanfaatan dana transfer.

### Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, variabel mediasi pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan PDRB total agregat sehingga belum mampu memisahkan kontribusi sektor ekstraktif yang dominan (67,84% dari PDRB) dari sektor non-ekstraktif padat karya. Kedua, unit observasi bersifat tunggal (*single time series*) di satu kabupaten selama 15 tahun, sehingga derajat kebebasan model relatif terbatas. Ketiga, ketimpangan pendapatan diukur secara eksklusif menggunakan rasio Gini tingkat kabupaten yang belum mampu menangkap ketimpangan spasial antarwilayah. Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan laju pertumbuhan PDRB non-ekstraktif, memperluas desain menjadi analisis data panel lintas kabupaten penghasil sumber daya alam, serta melengkapi pengukuran ketimpangan dengan Indeks Williamson atau pendekatan ekonometrika spasial.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis jalur, uji asumsi klasik, dan uji mediasi Sobel terhadap dinamika fiskal dan makroekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2010–2024, penelitian ini menyimpulkan beberapa hal. Dana transfer daerah yang terdiri atas DBH, DAU, DAK, dan Bantuan Keuangan Provinsi belum mampu menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah, baik secara simultan maupun parsial, yang mengonfirmasi bekerjanya fenomena natural resource curse. Pertumbuhan ekonomi sendiri tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, yang membuktikan karakteristik pertumbuhan yang eksklusif dan tidak inklusif.

Pada pengaruh langsung terhadap ketimpangan, DAU terbukti memperlebar ketimpangan secara signifikan akibat bias alokasi belanja birokrasi, sementara DAK terbukti efektif menurunkan ketimpangan melalui skema penargetan langsung pada pelayanan dasar. Adapun DBH dan Bantuan Keuangan Provinsi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan. Yang terpenting, pertumbuhan ekonomi gagal menjalankan fungsinya sebagai variabel mediasi, sehingga pengaruh dana transfer terhadap ketimpangan lebih dominan bersifat langsung. Hal ini menegaskan bahwa

daerah kaya sumber daya alam tidak dapat mengandalkan pertumbuhan ekonomi makro sebagai instrumen otomatis pengentasan kesenjangan.

Secara praktis, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan reformasi alokasi DAU ke arah pro-pemerataan, mempercepat dan menargetkan DAK secara spasial pada desa tertinggal, serta mereinvestasikan DBH sumber daya alam ke sektor padat karya. Secara teoretis, peneliti selanjutnya disarankan mendekonstruksi variabel mediasi menggunakan pertumbuhan PDRB non-ekstraktif, memperluas cakupan menjadi analisis data panel, serta mengadopsi pendekatan ekonometrika spasial dan indikator ketimpangan yang lebih sensitif terhadap dinamika antarwilayah. Dengan demikian, reorientasi kebijakan fiskal daerah dari paradigma pertumbuhan kuantitatif menuju penguatan kapasitas sektor padat karya secara langsung menjadi kunci dalam memutus rantai kutukan sumber daya alam demi pemerataan kesejahteraan yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Awaludin, M. G., & Wibowo, P. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus Fisik, dan Dana Desa terhadap Kemiskinan dan PDRB Daerah Tertinggal. *Jurnalku*, 3(4), 1017–1026. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i4.645>
- Cahyaningrum, R., & Prasetyo, P. E. (2025). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(12), 10369–10381. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i12.10369>
- Damaringtyas, A., & Yuliarmi, N. N. (2024). Determinan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. *OIKOS: Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 8(2), 209–224. <https://doi.org/10.23969/oikos.v8i2.9697>
- Fahrizal, M. F., & Bintoro, Y. J. (2022). Desentralisasi Fiskal dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 19(1), 1–11. <https://doi.org/10.33370/jmk.v19i1.734>
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). *Multivariate Data Analysis* (7th ed.). Pearson Education.
- Indrarto, G. B., Murharjanti, P., Khatarina, J., Pulungan, I., Ivalerina, F., Rahman, J., Prana, M. N., Resosudarmo, I. A. P., & Muharrom, E. (2013). *Konteks REDD+ di Indonesia: Pemicu, pelaku, dan lembaganya*. Center for International Forestry Research (CIFOR).
- Manek, M., & Badrudin, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Tabularasa*, 17(2), 167–179. <https://doi.org/10.35917/tb.v17i2.49>

- Marsella, D., & Gamayuni, R. R. (2025). Pengaruh Dana Perimbangan dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Ekonomika45*, 13(1), 1–12. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v13i1.5090>
- Nasyri, I. A., Hailuddin, & Fadliyanti, L. (2025). The Effect of Fiscal Balance Funds on Income Inequality and Economic Growth of Districts/Municipalities in West Nusa Tenggara During 2018–2023. *International Journal of Economic, Financial and Management Studies*, 8(12), 1070–1079. <https://doi.org/10.47191/jefms/v8-i12-57>
- Nurmansyah, F., & Tandean, V. A. (2023). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Transfer Khusus (DTK) terhadap Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Beberapa Daerah Otonomi. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia*, 8(2), 107–120.
- Pambudi, A. S. (2023). Kontribusi Dana Insentif Daerah Berbasis Penghargaan Pembangunan Daerah terhadap Pembangunan Kabupaten. *Bappenas Working Papers*, 6(1), 1–12.
- Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2004). SPSS and SAS Procedures for Estimating Indirect Effects in Simple Mediation Models. *Behavior Research Methods, Instruments, & Computers*, 36(4), 717–731.
- Putri, N. D. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Desentralisasi Fiskal, dan Belanja Modal terhadap Ketimpangan Pendapatan. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 3(4), 25. <https://doi.org/10.21776/jdess.2024.03.4.25>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Zaini, A. (2018). Pengaruh Kekayaan Sumberdaya Alam Batubara terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Borneo Administrator*, 13(2), 161–174.